

Panja MDGs pastikan layanan kesehatan ibu anak di RSUD Gianyar tetap jalan

Gianyar—

Panitia Kerja Millennium Development Goals (MDGs) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI memastikan adanya aktivitas layanan kesehatan ibu dan anak di RSUD Sanjiwani, Gianyar, Provinsi Bali, Rabu (27/11). Konfirmasi ini diperoleh langsung oleh Panja MDGs dari Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Sanjiwani, Gianyar, dr I Wayan Eka Dharmadi ketika Panja melakukan tinjauan ke layanan kesehatan yang dimiliki Gianyar.

“Seluruh dokter tetap bertugas. Hanya ada sekitar 4 dokter kandungan yang ditugaskan mewakili (menyampaikan solidaritas sesama dokter). Di sini ada 74 dokter dengan 49 diantaranya spesialis,” jawab dr I Wayan Eka Dharmadi ketika ditanya Ketua Panja MDGs, Dr Nurhayati Ali Assegaf terkait banyaknya dokter di berbagai daerah yang melakukan mogok kerja simbol solidaritas sesama profesi terhadap sejumlah insiden yang melibatkan dokter beberapa pekan ini.

“Kami merasa perlu mengecek, karena hal ini juga akan berkaitan dengan hasil pencapaian MDGs, meskipun di Bali, secara nasional pencapaian tujuan pembangunan millennium-nya telah berada di atas rata-rata nasional,” jelas Nurhayati usai bertemu dengan Bupati Gianyar, A.A Gde Agung Bharata untuk mendapatkan gambaran situasi MDGs di kabupaten tersebut.

Panja MDGs pada Rabu (27/11) ini melakukan tinjauan lapangan ke wilayah Bali, khususnya Gianyar sebagai upaya pendalaman referensi, mengingat dari kajian yang diperoleh, banyak daerah yang masih tidak memahami dengan jelas mengenai MDGs. Bali dipilih, jelas Nurhayati, lantaran secara nasional angka pencapaiannya berada di atas rata-rata nasional. “Ini menjadi bahan Panja untuk menganalisis kesenjangan apa yang dimiliki antara daerah yang pencapaiannya memadai dan yang belum. Dari kunjungan kami ke Jawa Timur, NTT, NTB, hingga Sumatera Barat, banyak fakta mengenai pemahaman MDGs yang masih kurang. Padahal, MDGs ini dideklarasikan sejak tahun 2000,” paparnya.

Sebelum melakukan audiensi dengan Bupati Gianyar, Panja juga bertemu dengan Gubernur Bali, Made Pangku Pastika untuk mendapatkan gambaran ragam kebijakan terkait MDGs. Anggota Panja MDGs, Muhammad Firdaus dalam kesempatan audiensi dengan Pemprov Bali menanyakan hal-hal apa saja yang menjadi *point of advantages* Bali agar dapat direplika sebagai *role model* dalam pencapaian MDGs.

Gubernur Bali memberikan gambaran mengenai pentingnya fokus dalam upaya kebijakan pembangunan. Sejauh ini, banyak program yang tersebar baik berasal dari pemerintah pusat maupun daerah. “Sebagai contoh, ada sekitar 48 program pembangunan dari berbagai kementerian. Kami melakukan fokus, pembangunan diarahkan ke desa-desa miskin. Di Bali ini ada 82 desa dengan kemiskinan di atas 35%. Kami fokus pembangunan di sana, gelontori dana Rp 1,2 miliar per desa,” papar Gubernur.

Gubernur juga memaparkan angka kemiskinan di Bali menurun dari 6,7% (2008) menjadi 3,95% saat ini. Persentase angka pengangguran juga terbaik kedua secara nasional yakni 1,8%. Sementara Gianyar pada 2010 meraih penghargaan *Leadership MDGs Award*, dan juga Kabupaten Sehat (Swasti Saba) tahun 2013. Namun Bali, lanjut Gubernur, menghadapi sejumlah masalah pembangunan yang bisa saja berpengaruh terhadap pencapaian MDGs, yakni HIV/AIDS (tertinggi kelima secara nasional)

dan masalah lingkungan. “Terkait alih fungsi lahan, masih sulit dikendalikan. Pariwisata yang pesat membuat investor tidak lagi rasional, harga berapapun dibeli. Kami sudah kirim surat ke BKPM untuk moratorium investasi di Bali Selatan,” beber dia.

Selain itu, agenda pasca-2015, setelah berakhirnya MDGs, juga menjadi sorotan dari Panja. Panja ingin mengulik sejauh mana daerah *aware* tentang isu *post-2015 development agenda*, dan bagaimana menyikapinya. Gubernur melalui Bappeda menjelaskan bahwa pihaknya telah menginformasikan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyusun rencana strategis RPJMD, dengan kisi-kisi acuan *post-2015 development agenda*, MP3KI dan MP3I. **(BKSAP DPR RI)**